

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul., 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi., 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashafa, Burhan., 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita Romli., 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- Azwar, Sarifuddin., 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chaerudin, *et.al.*, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami., 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi., 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Edelherz, Helbert., 1997, *The Investigation of White Collar Crime A Manual for Law Enforcement Agencies*, U.S. Department of Justice, Office Regional Operation Law Enforcement Assistance Administration.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad., 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja., 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta.
- Fuady, Munir., 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Greenberg, Theodore S., *et.al.*, 2009, *Stolen Asset Recovery: a good practice guide for non-conviction based asset forfeiture*, World Bank, Washington DC.
- Hamzah, Andi., 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya., 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., *et.al.*, 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., *et.al.*, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali.
- Husein, Yunus., 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung.
- IGM, Nurdjana., 2005, *Korupsi dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartikahadi, *et.al.*, 1994, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 21 Akuntansi Ekuitas*, Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi., 2006, *Memahami untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK RI, Jakarta.
- Liley, Peter., 2005, *Transaksi Kotor: Kebenaran yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*, (Penyunting: Bestari Kuswolo), Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna., 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Malibu, Jakarta.
- Moeljatno., 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasrudin, M. Irsan., *et.al.*, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-8, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Q., Tavinayati Yulia., 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahadiyan, Inda., 2014, *Hukum Pasar Modal Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Rahmah, Mas., 2019, *Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, Jakarta.

- Ramelan, *et.al.*, 2008, *Panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta.
- Remmelink, Jan., 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparni, *et.al.*, 2017, *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satuan Kerja Wilayah untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Miswar, Jakarta.
- Sutedi, Adrian., 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyatno., 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Komisi Pemberantasan Korupsi-Australia Department of Home Affairs-Pusat Studi Hukum dan Kebijakan-Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Jakarta.
- United Nations., 2009, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta.
- Usman, Marzuki., *et.al.*, 1997, *Pengertian Dasar Pasar Modal*, Jakarta Institut Bankir Indonesia-Jurnal Keuangan dan Moneter (Departemen Keuangan RI), Jakarta.
- Wijayanto, dan Ridwan Zachrie., 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wojowasito, S., 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.

B. Jurnal

Hakim, Lukmanul dan Abraham Yazdi Martin., “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal De'Rechstaat*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Harrington, Matthew P., “Rethinking In Rem: The Supreme Court’s New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture”, *Yale Law and Policy Review*, Vol. 12, No. 2, 1994.

Husein, Yunus., “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, Desember 2010.

_____, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 2, Januari 2004.

C. Penulisan Hukum

Arianto, Bagus Dwi., 2018, *Perampasan Harta Kekayaan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Pelakunya Tidak Ditemukan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli., 1996, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hutajulu, Augustinus., 2016, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sadeli, Wahyudi Hafiludin., 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program

Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sailelah, Sardiansyah H.I., 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Satrio, W Hangkoso., 2012, *Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Ullistiya, Dina., 2020, *Bank Tanah: Konsep dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Makalah/Laporan

Ramelan, *et.al.*, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta.

Ramelan, *et.al.*, 2015, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta.

PPATK RI., “*Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia*”, Laporan Hasil Diskusi PPATK bersama Linda M. Samuel, Jakarta, 17-18 Juli 2008.

Marlyna, Henny., *et.al.*, “*Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*”, Makalah, Konferensi Nasional Hukum dan Politik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Husein, Yunus., “*Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*”, Makalah, Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntan Indonesia, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang, 8 Mei 2006.

Husein, Yunus., *et.al.*, 2003, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Sulastriyono., 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum – Program Sarjana Mata Kuliah Wajib*, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Website

Grantland, Brenda., “Asset Forfeiture: Rules and Procedures”, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.html>, diakses pada 20 Mei 2021.

Kemendikbud., 2016, “Aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/aset/>, diakses pada 20 April 2021.

Kemendikbud., 2016, “Deduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi/>, diakses pada 18 Mei 2021.

Kemendikbud., 2016, “Perampasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perampasan/>, diakses pada 25 Mei 2021.

Kemendikbud., 2016, “Rampas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rampas/>, diakses pada 25 Mei 2021.

Mubarok, Ali Husein., “Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembaga dalam Pasar Modal Indonesia”, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-mekanisme-pasar-sekunder-dan-fungsi-lembaga-nya-dalam-pasar-modal-indonesia-ali-husein-mubarok.pdf>, diakses pada 19 Juni 2021.

Otoritas Jasa Keuangan., “Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/nrasra/Documents/Penilaian%20Risiko%20TPPU%20pada%20Sektor%20Jasa%20Keuangan%20Th%202017%20%28SRA%29.pdf>, diakses pada 9 Februari 2021.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/PID.SUS/TPK/2015/PN. Jkt Pst, perihal Putusan perkara Muhammad Nazaruddin., 15 Juni 2016.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Rampasan Negara

dan Barang Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 568)